

**ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KASUS NARKOBA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

DISERTASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Doktor
Program Studi Ilmu Lingkungan



OLEH
BUDI PRAYITNO
NIM. 18327004

**PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN AKHIR DISERTASI

Mahasiswa : **Budi Prayitno**
NIM. : 18327004
Program Studi : Ilmu Lingkungan

Menyetujui:

Promotor,



Prof. Ali Amran, M.Pd., M.A., Ph.D.
NIP. 19471022 197109 1 001

Co-Promotor,



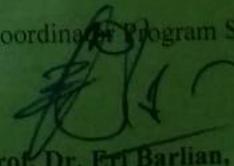
Dr. Nurhasan Syah, M.Pd.
NIP. 19601105 198602 1 001

Mengesahkan:



Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Koordinator Program Studi,



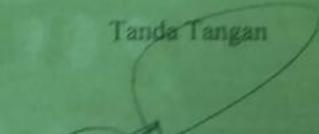
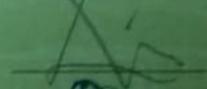
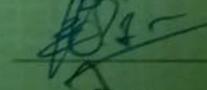
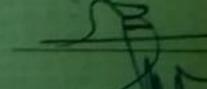
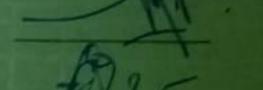
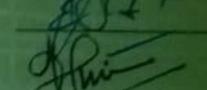
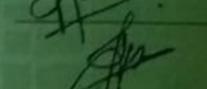
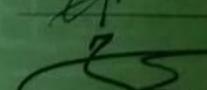
Prof. Dr. Eri Barlian, M.S.
NIP. 19610724 198703 1 001

PERSETUJUAN KOMISI UJIAN DISERTASI

Mahasiswa : Budi Prayitno

NIM : 18327004

Dipertahankan di depan Penguji Disertasi
Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor Pascasarjana
Universitas Negeri Padang
Hari: Senin, Tanggal: 21 Februari 2022

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Ganefri, Ph.D. Ketua (Rektor)	
2.	Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D. Sekretaris (Direktur)	
3.	Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd. Anggota (Wakil Direktur I)	
4.	Prof. Dr. Eri Barlian, M.S. Anggota (Koordinator Program Studi)	
5.	Prof. Ali Amran, M.Pd., M.A., Ph.D. Anggota (Promotor/Penguji)	
6.	Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. Anggota (Co-Promotor/Penguji)	
7.	Prof. Dr. Eri Barlian, M.S. Anggota (Pembahas/Penguji)	
8.	Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D. Anggota (Pembahas/Penguji)	
9.	Dr. Tjung Hauw Sin, M.Pd., Kons. Anggota (Pembahas/Penguji)	
10.	Dr. Jamalul Ikhsan, M.M. Anggota (Penguji Eksternal Institusi)	

Koordinator Program Studi,



Prof. Dr. Eri Barlian, M.S.
NIP. 19610724 198703 1 001

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Disertasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi saya yang berjudul:

ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KASUS NARKOBA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar Doktor di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberika oleh universitas batal saya terima.

Padang, 4 April 2022

Yang memberi pernyataan,



Budi Prayitno

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa menyelesaikan disertasi yang berjudul Arah Kebijakan Penanggulangan Kasus Narkoba Di Provinsi Sumatera Barat.

Disertasi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Ali Amran, M.Pd, MA, Ph.D dan Bapak Dr. Nurhasan Syah, M.Pd sebagai Promotor dan Co Promotor, yang telah memberi dukungan moril dan masukan demi kesempurnaan disertasi ini. Dan yang terhormat Bapak Prof Dr. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, dan Bapak Prof. Eri Barlian, MS serta Bapak Dr. Cun Haw Sin yang telah memberikan arahan dan masukan demi perbaikan disertasi saya ini. Dalam kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor UNP, Bapak. Prof. Ganefri, Ph.d, Ibu Direktur Pasacasarjana UNP, Ibu Prof. Dr. Yeni Rozimella, MEd, dan yang terhormat Bapak asisten direktur 1, Bapak Prof. Dr. Atma Zaki, M.Pd, serta semua pihak terutama untuk sumber-sumber bacaan yang karyanya digunakan untuk disertasi ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun disertasi ini dengan baik dan lengkap. Namun jika ada kekurangan-kekurangannya, penulis dengan rendah hati akan memperhatikan semua saran dan kritikan sehingga akan membantu dalam perbaikan disertasi berikutnya.

Padang, Maret 2022

Budi Prayitno

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Persetujuan Akhir Disertasi	ii
Persetujuan Komisi Ujian Disertasi.....	iii
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Disertasi	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xii
Abstract	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah.....	5
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian	6
1.7. Kebaharuan (Novelty).....	7
1.8. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian Teori	10
2.1.1. Pola Spasial Kriminal Narkoba	10
2.1.2. Ilmu Lingkungan	11
2.1.3. Ekologi Kriminal	15
2.1.4. Sistem Informasi Geografis	17
2.2. Kajian Relevan.....	20
2.3. Kerangka Konseptual.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian.....	24
3.2. Populasi dan Sampel	24
3.3. Bahan dan Alat.....	25
3.4. Jenis Data dan Alat Pengumpulan Data.....	25
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	26
3.6. Variabel dan Indikator	27
3.7. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Temuan Umum	36
4.1.1. Letak Geografis	36
4.1.2. Keadaan Penduduk Provinsi Sumatera Barat.....	36
4.1.3. Kondisi Fisik dan Lingkungan	39
4.2. Temuan Khusus	41
4.2.1. Sebaran Kasus Narkoba Di Provinsi Sumatera Barat	41
4.2.2. Keterkaitan Faktor Ekonomi Dan Sosial Terhadap Kasus Narkoba Di Provinsi Sumatera Barat	52
4.2.3. Model Spasial Kasus Narkoba Berdasarkan Faktor Ekologi Kependudukan di Provinsi Sumatera Barat.....	84
4.2.4. Arah Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Sumatera Barat 100	
4.3. Pembahasan.....	118
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	129
5.1. Kesimpulan.....	129
5.2. Implikasi	130
5.3. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4. 1: Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	37
4. 2: Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	38
4. 3: Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota	39
4. 4: Kasus Narkoba dan tersangka berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016.....	42
4. 5: Kasus Narkoba dan tersangka berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017.....	44
4. 6: Kasus Narkoba dan tersangka berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018.....	46
4. 7: Kasus Narkoba dan tersangka berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019.....	48
4. 8: Kasus Narkoba dan tersangka berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020.....	50
4. 9: Hasil Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2014-2020.....	53
4. 10: Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat.....	55
4. 11: Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 Diatas dan Dibawah Pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat	58
4. 12: Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 Diatas dan Dibawah Pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat	62
4. 13: Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 Diatas dan Dibawah pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat	65
4. 14: Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2014-2020.....	68
4.15: Pengaruh Angkatan Kerja Bekerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2014-2020.....	70

4. 16: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2014-2020	73
4. 17: Persentase Jumlah Penduduk Terhadap Kasus Narkoba	76
4. 18: Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Kasus Narkoba.....	78
4. 19: Angkatan Kerja Terhadap Kasus Narkoba	79
4. 20: Tingkat Pengangguran Terhadap Kasus Narkoba	81
4. 21: Kemiskinan terhadap Kasus Narkoba.....	83
4. 22. Maksud dan tujuan kebijakan penanggulangan	100
4. 23. Pemahaman kebijakan penanggulangan	101
4. 24. Upaya penanggulangan disosialisasikan.....	101
4. 25. Program upaya penanggulangan	102
4. 26. Penanganan narkoba di Sumatera Barat oleh Kepolisian	102
4. 27. Penanggulangan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi.....	102
4. 28. Jumlah SDM di Kepolisian sudah memadai	103
4. 29. Standar kualifikasi SDM di Kepolisian	104
4. 30. Pengetahuan, keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas	104
4. 31. SDM di Kepolisian didukung dengan dana yang cukup.....	104
4. 32. Alokasi dana secara khusus	105
4. 33. alokasi dana di setiap daerah di Sumatera Barat.....	105
4. 34. Dukungan sarana dan prasarana.....	106
4. 35. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba ada hambatan	107
4. 36. Komunikasi dan koordinasi antara instansi terkait	107
4. 37. Kerjasama antar instansi terkait	107
4. 38. Kepolisian memerlukan dukungan Pemerintah Daerah.....	108
4. 39. Dukungan payung hukum: UU, PP maupun Perda.....	109
4. 40. Dukungan dari Pemda, LSM, Swasta serta Masyarakat	109
4. 41. Penanganan narkoba terpusat di Polda Sumatera Barat.....	110
4. 42. Hubungan koordinasi yang baik dengan institusi lain.	110
4. 43. Rapat koordinasi antara Kepolisian dengan institusi terkait.....	111
4. 44. Rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait	111
4. 45. Kebijakan Kepolisian sebagai pedoman	112

4. 46. Program sudah dijalankan sesuai dengan pedoman Kepolisian	112
4. 47. Upaya penanggulangan masih mengalami kendala	113
4. 48. Implementasi Kebijakan dimonitor dan dievaluasi.....	113
4. 49. Mean Total Skor Indikator Komunikasi	114
4. 50. Mean Total Skor Indikator Sumberdaya.....	115
4. 51. Mean Total Skor Indikator Struktur Birokrasi.....	116
4. 52. Mean Total Skor Indikator Kecenderungan.....	116
4. 53. Mean Total Skor Indikator Hubungan Antar Organisasi/Instansi	117
4. 54. Mean Total Skor Indikator Pelaksanaan Program	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	23
3.1 Kuadran Moran's Scaterplot	31
4. 1 Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	43
4. 2 Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	44
4. 3 Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	45
4. 4:Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.....	46
4. 5 Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	47
4. 6 Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.....	48
4. 7 Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	49
4. 8 Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.....	50
4. 9 Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	51
4. 10 Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	52
4. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat 2014, 2017, 2020	55
4. 12 Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat.....	57
4. 13 Peta Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	60
4. 14 Peta Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	63
4. 15 Peta Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	66

4.16 Peta Faktor Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	69
4. 17 Peta Faktor Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Angkatan Kerja Bekerja.....	72
4. 18 Peta Faktor Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah.....	75
4. 19 Persentase Jumlah Penduduk Terhadap Kasus Narkoba	77
4. 20 Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Kasus Narkoba.....	79
4. 21 Angkatan Kerja Terhadap Kasus Narkoba	81
4. 22 Pengangguran Terhadap Kasus Narkoba.....	82
4. 23 Kemiskinan Terhadap Kasus Narkoba.....	84
4. 24 Moran Scatterplot Dari Jumlah Penduduk Terhadap Kasus Narkoba	85
4. 25 Peta Pola Autokorelasi Spasial Jumlah Penduduk terhadap Kasus narkoba	87
4. 26 Moran Scatterplot dari PAD terhadap Kasus narkoba.....	88
4. 27 Peta Pola Autokorelasi Spasial PAD Terhadap Kasus Narkoba.....	90
4. 28 Moran Scatterplot dari Angkatan Kerja Terhadap Kasus Narkoba	91
4. 29 Peta Pola Autokorelasi Spasial Angkatan Kerja Terhadap Kasus narkoba ..	93
4. 30 Moran Scatterplot dari Pengangguran terhadap Kasus narkoba	94
4. 31 Peta Pola Autokorelasi Spasial pengangguran terhadap Kasus narkoba	96
4. 32 Moran Scatterplot Kemiskinan Terhadap Kasus Narkoba.....	97
4. 33 Peta Pola Autokorelasi Spasial Kemiskinan Terhadap Kasus narkoba	99

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data kasus narkoba di Sumatera Barat
2. Data tersangka Kasus Narkoba di Sumatera Barat
3. Data penduduk dan kasus narkoba di Sumatera Barat
4. Angkatan kerja dan PAD di Sumatera Barat
5. Dokumentasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)
6. Kuesioner penelitian

ABSTRAK

Budi Prayitno, 2022. Arah Kebijakan Penanggulangan Kasus Narkoba di Provinsi Sumatera Barat. Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Keterkaitan antara kriminalitas, dinamika spasial dan disfungsi sosial masyarakat menjadi salah faktor penentu tingkat kenyamanan suatu kota. Sejak memasuki dekade kedua abad 21. Salah satu tindak kriminalitas yang hari-hari ini semakin bertambah dan semakin susah diberantas adalah narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan populasi wilayah yaitu seluruh kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Data menggunakan data primer yang didapatkan dari pengisian kuesioner oleh responden. Data sekunder menggunakan data yang didapatkan dari instansi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis spasial, analisis statistik deskriptif, analisis autokorelasi spasial, analisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan analisis skala likers untuk analisis arah kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola spasial kasus narkoba di provinsi Sumatera Barat tersebar di seluruh kabupaten/Kota. Kota padang merupakan wilayah yang paling banyak memiliki kasus narkoba dan tersangka kasus narkoba. Faktor ekonomi dan faktor sosial menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pola autokorelasi spasial. semakin tinggi jumlah penduduk maka juga semakin tinggi kasus narkoba. Model spasial kasus narkoba berdasarkan analisis indeks moran antara jumlah penduduk, angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan kemiskinan dengan kasus narkoba adalah pola cluster (autokorelasi spasial positif). Sedangkan pola autokorelasi spasial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kasus narkoba adalah pola acak, terdapat autokorelasi spasial negatif. Implementasi kebijakan penanggulangan kasus narkoba di Sumatera barat dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi, dan pelaksanaan program secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi program di kebijakan tersebut.

ABSTRACT

Budi Prayitno, 2022. Policy Direction for Overcoming Drug Cases in West Sumatera Province. Post Graduate Program of Universitas Negeri Padang.

The relationship between crime, spatial dynamics and social dysfunction of the community is one of the determining factors for the comfort level of a city. Since entering the second decade of the 21st century. One of the crimes that are increasing and increasingly difficult to eradicate is drugs. This study uses a quantitative approach. This study uses a regional population, namely all districts/cities throughout the province of West Sumatra. Data using primary data obtained from filling out questionnaires by respondents. Secondary data uses data obtained from agencies. Data analysis techniques used spatial analysis methods, descriptive statistical analysis, spatial autocorrelation analysis, economic growth rate analysis and Likers scale analysis for policy direction analysis.

The results of the study indicate that the spatial pattern of drug cases in the province of West Sumatra is spread across all districts/cities. The city of Padang is the area that has the most drug cases and drug suspects. Economic factors and social factors are factors that influence the spatial autocorrelation pattern. The higher the population, the higher the drug cases. Spatial model of drug cases based on Moran index analysis between population, labor force, unemployment rate, and poverty with drug cases is a cluster pattern (positive spatial autocorrelation). While the spatial autocorrelation pattern between Regional Original Income (PAD) and drug cases is a random pattern, there is a negative spatial autocorrelation. The implementation of drug case management policies in West Sumatra is seen from the indicators of communication, resources, bureaucratic structure, trends, inter-organizational relations, and program implementation in general has been going well. However, when viewed from each policy indicator, it shows that there are differences in the success of program implementation in the policy.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu dari 9 kriteria utama survei Livable City yang diadakan sejak tahun 2011 yang dilakukan Ikatan Ahli Perencana (IAP) adalah Aspek Keamanan, faktor ini menempati urutan ke-empat dari 5 aspek utama penentu tingkat kenyamanan kota dengan persentase 11,08 %, sedangkan faktor-faktor lain yaitu Aspek ekonomi (27,97%), Aspek tata ruang (19,66%), Aspek fasilitas pendidikan (13,29%), Aspek kebersihan (10,80%)². Mayoritas responden yang terlibat survey berpendapat bahwa tingkat kriminalitas merupakan salah satu permasalahan utama.

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia pernah menyampaikan data indeks kota layak huni di Indonesia melalui survei bertajuk Most Livable City Index (MLCI) tahun 2017. Survey ini mengukur persepsi warga Kota mengenai kelayak-hunian kota tempat tinggalnya. Indeks tersebut disusun berdasarkan hasil survei yang digelar di 26 kota dan 19 provinsi. Pada tahun 2017, hasil survey menunjukkan bahwa index kota layak huni untuk Kota Solo mencapai 66,9. Selain Solo, ada enam kota lain yang masuk ke dalam top tier city, yakni kota dengan nilai index livability di atas rata-rata. Keenam kota tersebut yakni Palembang (66,6), Balikpapan (65,8), Denpasar (65,5), Semarang (65,4), Tangerang Selatan (65,4) dan Banjarmasin (65,1). Tidak ada kota maupun kabupaten di provinsi Sumatera Barat yang masuk kota layak huni, minimal di 7 besar.

Sejak memasuki dekade kedua abad 21, wilayah-wilayah di Indonesia mengalami berbagai persoalan yang berujung pada menurunnya kualitas kehidupan. Permasalahan lingkungan, sosial, kependudukan, infrastruktur, lapangan kerja, dan lain sebagainya merupakan isu yang seringkali bermunculan di ruang publik, baik dalam bentuk media ataupun di seminasi publik. Di kota-kota besar, faktor ekonomi menjadi katalis dari kedua objek perencanaan dan telah menjadikan jumlah penduduk perkotaan secara global

sudah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di kawasan pedesaan.

Karakteristik ruang sebuah wilayah mampu memberikan gambaran sederhana bagaimana keterkaitan antara kriminalitas, dinamika spasial dan disfungsi sosial masyarakat menjadi salah faktor penentu tingkat kenyamanan suatu kota. Pemikiran ini sudah dimulai oleh Park (1930) yaitu” *It is probably the breakin down of local attachments and the weakening of the restraints and inhibition of the primary groups, under the influence of the urban enviroment, which are largely responsible for the increase of vice and crime in the great city*”. Akibat perbedaan-perbedaan ruang ini disebabkan oleh adanya mekanisme-mekanisme alokatif yang kuat yang menciptakan dan memaksakan timbulnya kesenjangan (disparities) dan ketidakadilan dan akhirnya menimbulkan kriminalitas. Salah satu tindak kriminalitas yang hari- hari ini semakin bertambah dan semakin susah diberantas adalah penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan (Narkoba). Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Berdasarkan observasi peneliti sejak Desember tahun 2019, dan dengan menggunakan sudut pandang ilmu lingkungan, berdasarkan aspek abiotik, contohnya narkoba jenis shabu, narkoba jenis ini bersumber dari luar negeri, masuknya ke Indonesia lewat jalur darat, udara dan laut. Hampir 80% nya masuk lewat jalur laut. Di Sumatera Barat shabu masuk lewat laut dari Malaysia, kemudian lewat jalur darat dari Provinsi Riau. Menggunakan aspek biotik, Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat merupakan wilayah yang sangat subur sehingga bisa dengan mudah tumbuh pohon ganja. Sumber narkoba jenis ganja disamping dihasilkan di local Sumatera Barat juga berasal wilayah Aceh yang

jalur transportasinya melalui aceh via jalan darat melewati wilayah Sumatera Utara dan terus ke Sumatera Barat.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat (Dit Resnarkoba) setiap bulan merilis laporan penindakan khusus Narkoba. Hal ini terjadi karena hampir setiap hari ada pelaku pemakai dan pengedar yang ditangkap dan di proses hukum. Setiap bulan tidak pernah tidak ada kasus. Selalu saja ada kasus yang di proses. Rilis data tanggal 8 September 2020 terlihat Dit Resnarkoba mengungkap 23 kasus, Polres Kota padang 22 kasus dan Polres Solok sebanyak 11 kasus. Terlihat, masih banyak kasus Narkoba yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ilmu lingkungan salah satunya bisa menggunakan pendekatan ekologi. Dalam kasus kriminalitas penyalahgunaan narkotika, pendekatan ekologi bisa di manfaatkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekologi kriminal. Teori Ekologi Kriminal mengkaji peran tempat (place) dan ruang (space) dalam membentuk tindak kriminalitas pencurian sesuai teori-teori spasial sebagai dampak disfungsi sosial dan dampak perkembangan pola spasial wilayahnya. Salah satu disfungsi sosial yang terlihat saat ini di Provinsi Sumatera Barat adalah penyalahgunaan Narkoba.

Pendekatan ekologi kriminal menganalisis fenomena di sebuah wilayah, pendekatan ini pertama kali diilhami oleh proses persaingan alami yang terjadi pada tumbuhan dan binatang. Dalam kehidupan binatang dan tumbuhan terlihat adanya interelasi antara berbagai jenis spesies dengan lingkungan dan proses interelasi ini telah menimbulkan perimbangan kualitas dan kuantitas spesies yang kemudian pada jangka waktu tertentu akan membentuk pola persebaran spesies yang khas. Ide ini mendorong pengembangan “Human Ecology” yang kemudian oleh Mckenzie (1925) diartikannya sebagai suatu studi hubungan spatial dan temporal dari manusia yang dipengaruhi oleh kekuatan, selektif, distributif, dan akomodatif dari lingkungannya. Selanjutnya Park and Burgess (1930) dengan postulatnya “*Crime will always display an uneven geographical distribution and that this variation is the result of the*

interrelationship between humans (or groups of humans) and their surroundings” (“Kejahatan akan selalu menampilkan persebaran geografis yang tidak merata dan variasi ini merupakan hasil dari hubungan timbal balik antara manusia (atau kelompok manusia) dengan lingkungannya”); menyatakan bahwa hubungan tingkat-tingkat kejahatan sebuah wilayah dan pola geografisnya yang sejak 1930 lebih dipopulerkan sebagai Teori Ekologi Kriminal (*Crime Ecology*). Sedangkan menurut Shaw and McKay (1942), “*They observed that crime rates were unevenly distributed throughout the city in a non-random manner and that communities closest to the city centre were those with the highest rates*” (“Mereka mengamati bahwa tingkat kejahatan tidak merata di seluruh kota dengan cara yang tidak acak dan bahwa komunitas yang paling dekat dengan pusat kota adalah yang memiliki tingkat tertinggi”); selengkapnya di situs Department of Justice Canada (2006). Beberapa pendukung teori ini yaitu kriminolog Amerika Serikat, Rodney Stark (1987) mengatakan bahwa “*asks how neighborhoods can remain areas of high crime and deviance despite a complete turnover of their populations. He concludes that there must be something about places that sustains crime*” (“pertanyaan bagaimana lingkungan dapat terus menjadi area kejahatan dan penyimpangan yang tinggi meskipun populasi benar-benar berubah karakternya. Bisa kita simpulkan bahwa pasti ada sesuatu tentang tempat-tempat yang menopang kejahatan”).

Dengan fakta dan fenomena pengungkapan kasus Narkoba di Provinsi Sumatera Barat, serta teori di atas, maka penelitian ini akan mengkaji pola dan fenomena spasial kasus Narkoba dan korelasi faktor ekologi kriminal narkoba di Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan mampu memberikan gambaran dan arah kebijakan mengenai penyalahgunaan Narkoba di masyarakat sebagai dampak dari pengembangan wilayah secara fisik dan sosial sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan preventif dari aspek keruangan dan ekologi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Peningkatan kasus narkoba di Sumatera Barat dari tahun ke tahun
2. Penegakan hukum pemberantasan kasus narkoba di Sumatera Barat
3. Pola spasial kasus narkoba di Sumatera Barat
4. Pola distribusi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat
5. Faktor yang mempengaruhi peningkatan peredaran narkoba di Sumatera Barat
6. Model spasial kasus narkoba di Sumatera Barat
7. Kebijakan penanggulangan kasus narkoba di Sumatera Barat

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Batasan wilayah penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat
2. Batasan lingkup penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:
 - a. Pola spasial kasus narkoba
 - b. Faktor ekonomi dan sosial terhadap kasus narkoba
 - c. Model spasial kasus narkoba
 - d. Arah kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
3. Batasan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi menggunakan pendekatan ekologi kriminal dengan metode analisis spasial dan analisis statistik deskriptif.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana distribusi spasial kasus narkoba di Provinsi Sumatera Barat?

2. Bagaimana keterkaitan faktor ekonomi dan faktor sosial terhadap kasus narkoba di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana model spasial kasus narkoba di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana arahan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis tentang:

1. Pola spasial kasus narkoba di Provinsi Sumatera Barat
2. Pengaruh lingkungan ekonomi dan sosial terhadap kasus narkoba di Provinsi Sumatera Barat
3. Model spasial kasus narkoba di Provinsi Sumatera Barat
4. Arahan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi kepada dua bagian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yakni dapat dirumuskannya teori model spasial kasus narkoba dan arah kebijakan penanggulangan kasus narkoba, dengan proses kegiatan penelitian serta kesimpulan yang mencirikan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang lingkungan dengan topik penyalahgunaan Narkoba dan kaitannya dengan ekologi kriminal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Bagi instansi pemerintah sebagai salah satu masukan cara pengelolaan wilayah yang dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi sebagai salah satu bentuk tugas dan fungsi utama masing-masing lembaga.

b. Bagi pihak lain

Manfaat bagi pengambil kebijakan sebagai dasar perencanaan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan wilayah dengan lebih

memperhatikan faktor sosial yang mampu menimbulkan tindak kriminalitas.

c. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata tiga (S3) pada Program Doktorat Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.

1.7. Kebaharuan (Novelty)

Belum ditemukan penelitian terbaru yang berasumsi bahwa kasus penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh letak dan lokasi sebuah wilayah berdasarkan faktor sosial dan ekonomi, dan belum ditemukan arah kebijakan untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba yang berdasarkan karakteristik sosial ekonomi sebuah wilayah. Kebijakan penanggulangan harus di desain sesuai dengan karakteristik wilayah dimana kasus tersebut terjadi.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian ini. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. (Undang-Undang Narkotika, 2009)

2. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. (Simangunsong, 2009).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. (Rofii, 2017)

4. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat, atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa, maka yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja (K) dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (MP). (Subijanto, 2019)

5. Tingkat pengangguran

Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Dan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase

6. Model spasial

Model spasial adalah matriks pembobot spasial, matriks yang mencerminkan adanya hubungan antara wilayah dengan wilayah lain dengan menggunakan pendekatan wilayah berupa nilai ketetanggaan antar wilayah. (Djuraidah, 2012)

7. Arah kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi program penanggulangan penyalahgunaan narkoba agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode tertentu, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. (Suyatna, 2018)